



RENCANA KERJA 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka pemerintah melalui setiap Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini, diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna dan berdaya guna, bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu kepada Perencanaan Strategis 2025-2029 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih ditetapkan.

Program Kegiatan pada RENJA 2026 ini mengacu pada Program Kegiatan yang ada pada RENSTRA 2025 -2029 dengan mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun – tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru secara berkesinambungan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, tujuan, sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan

rencana kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Benteng, Agustus 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL



DR. ANDE FATONRANGI PASBAL, M.M

Pangkal Pembina Utama Muda

Nip : 19670905 1 98811 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyajian	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	34
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	62
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	63
3.3 Program dan Kegiatan	65
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
BAB V : PENUTUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara perubahan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD dimana dalam pasal 82 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.

Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai salah satu pedoman kerja selama 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 1 (satu) Tahun.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatangi sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis di dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penerapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan.

1. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses Penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemamfaatan Sumber Daya Alam lainnya. Musrembang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah , Renstra Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA Perangkat Daerah, berfungsi untuk menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah (PD) sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolak ukur indicator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 322);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai Acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian program Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
3. Menciptakan kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk peningkatan capaian kinerja pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana program kegiatan prioritas, Penataan Administrasi Kependudukan tahun 2026.
2. Sebagai Pedoman dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
3. Menjadi Acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun anggaran 2026, merupakan informasi dan umpan balik antar bagian/bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN, memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematikan penulisan

BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2024, Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN, memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Reviu Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024
- b. Sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026

Berikut implikasi yang timbul terhadap target capaian program yang berupa realisasi kinerja program kegiatan yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2024	Realisasi Pagu 2024	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
I.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP -EI	241.522.000	241.403.420	99,95 %	98 %	94,38 %	96,31 %
1.	Penataan pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk	44.562.000	44.448.420	99,75%	100%	100%	100%
	a. Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	44.562.000	44.448.420	97,75%	3 dok	3 dok	100%
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	196.960.000	196.955.000	99,99%	100 %	100 %	100 %
	a. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	196.960.000	196.955.000	99,99%	1 dok`	1 dok	100 %
II.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	41.640.000	41.425.000	99,48%	94,5%	98,27%	103,99%
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan layanan pencatatan sipil	41.640.000	41.425.000	99,48 %	100 %	100 %	100 %
	a. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	41.640.000	41.425.000	99,48 %	3 Lap	3 Lap	100 %
III.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (Penunjang)	58.199.000	49.199.387	98,73%	88,46%	62,96%	71,17%

1.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan penataan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	20.825.000	20.470.387	98,29%	100%	100%	100%
	a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	20.825.000	20.470.487	98,30%	2 Lap	2 Lap	100%
2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Diselenggarakan	37.374.000	37.223.000	99,59%	100 %	81,48%	81,48%
	a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	17.374.000	17.316.000	99,67%	12 Lap	12 lap	100%
	b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan	Pemberian Hak akses Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna	20.000.000	19.907.000	99,54%	27 PKS	17 PKS	62,96%

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2024	Realisasi Pagu 2024	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase capaian kinerja (%)	3.514.190.000	3.316.677.648	94,38%	7053%	67,67%	95,95%
		2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)				88%	89,74%	101,97%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	49.616.000	48.719.100	99,19 %	100 %	100 %	100 %

	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Penyusunan Dokumen Renja Awal/Perubahan Penyusunan Dokumen Renstra	15.366.000	15.174.300	98,75% %	3 Dok	3 Dok	100 %
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	5.00.000	4.940.500	98,81%	1 Dok	1 Dok	100 %
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	5.000.000	4.847.800	96,96%	1 Dok	1 Dok	100 %
	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	5.000.000	4.837.000	96,76%	1 Dok	1 Dok	100 %
	e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	5.000.000	4.969.800	99,40%	1 Dok	1 Dok	100 %
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan LKPJ Penyusunan LPPD	6.250.000	6.181.500	98,90%	3 lap	3 Lap	100 %
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Perjanjian Kinerja Evaluasi Rencana Aksi dan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan SKM	8.000.000	7.767.400	97,09%	3 Lap	3 Lap	100 %
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	2.453.596.400	2.308.043.844	95,00%	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.413.281.000	2.258.346.049	93,58%	12 Lap	12 Lap	100 %
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	4.779.900	95,60%	12 Lap	12 Lap	100 %
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	11.239.400	10.623.100	94,60%	1 Lap	1 Lap	100 %
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	5.000.000	4.808.900	96,18%	2 Lap	2 Lap	100 %
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	14.076.000	14.016.800	99,58%	12 Lap	12 Lap	100 %

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Anggaran	5.000.000	4.823.000	96,46%	12 Lap	12 Lap	100 %
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan adminstrasi umum perkantoran	231.808.000	230.947.700	99,62%	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.951.100	98,78%	6 Paket	6 Paket	100 %
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8.780.000	8.779.800	99%	6 Paket	6 Paket	100 %
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.120.000	7.120.000	100 %	6 Dok	6 Dok	100 %
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.908.000	211.096.800	99,62%	12 Lap	12 Lap	100 %
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminstrasi kepegawaian ASN	5.000.000	4.993.000	99,86%	100 %	100 %	100 %
	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ASN	5.000.000	4.993.000	99,86 %	12 Lap	12 Lap	100 %
5.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminstrasi barang milik daerah sebagai penunjang pelayanan	4.921.000	4.751.000	96,55%	100 %	100 %	100 %
	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4.921.000	4.751.000	96,55%	4 Lap	4 Lap	100 %
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kinerja	344.000.000	324.327.700	94,28%	100 %	73,33%	73,33%
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	344.000.000	324.327.700	94,28%	15 unit	11 unit	73,33%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	266.388.600	247.073.700	92,74%	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.899.000	98,99%	12 Lap	12 Lap	100 %

	b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	73.075.000	54.917.507	75,15%	12 Lap	12 lap	100 %
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.313.600	182.257.200	99,42%	12 Lap	12 Lap	100 %
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya usia pakai sarana dan prasarana penunjang pelayanan	158.860.000	158.458.099	99,98 %	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Roda Dua	18.181.000	18.200.000	99,90% %	5 unit	5 unit	100 %
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Roda Empat	72.260.000	71.898.000	99,50%	2 Unit	2 Unit	99,80%

3. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- Faktor - faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain :

- a. Dukungan Dana belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan keliling.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM.
- d. Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja tidak seimbang,
- e. Jenis pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani
- f. Adanya penambahan persyaratan untuk pengguna data kependudukan dimana OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan diwajibkan memiliki sertifikat ISO 27001 sementara belum ada satupun OPD yang memiliki sertifikat tersebut dikarenakan biaya pengadaan sertifikatnya yang terlalu tinggi.
- g. Lambatnya respon Dirjen Dukcapil untuk pengurusan Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan OPD pemanfaat data kependudukan.

Faktor –Faktor yang menyebabkan terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

- a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Adanya perkembangan teknologi informasi.
 - c. Adanya beberapa inovasi yang menunjang kelancaran pengurusan Administrasi Kependudukan.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- a. Perlu penambahan dana untuk pelaksanaan pelayanan baik pelayanan di MPP, Pelayanan Online maupun pelayanan keliling.
 - b. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana guna menunjang lancarnya segala aktivitas untuk melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.
 - c. Peningkatan pelayanan keliling ke desa- desa terpencil sehingga dapat memenuhi pencapaian target nasional.

- d. Perlu diadakan perekrutan pegawai Dukcapil dan pelatihan atau bimtek bagi SDM Pelayanan Disdukpencapil.

Berikut Tabel T.C.29 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejauh mana target kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dan rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) tahun 2026 adalah :

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan (Resnra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan						
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)					
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja	71,51 %	100 %	70,53%	67,67%	95,95%	70,53 %	240,81 %	3,37			
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	91,00 %	99,27 %	88 %	89,74%	101,97%	88,00 %	269,42 %	2,96			
2	12	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3		
2	12	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	3 Dok	9 Dok	3
2	12	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	3
2	12	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	3
2	12	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	2 Dok	2
2	12	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	2 Dok	2

2	12	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100 %	3 Lap	9 Lap	3
2	12	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapoean Evaluasi Kinerja yang tersusun	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100 %	3 Lap	9 Lap	3
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Laporan Keuagan yang disusun secara Tepat, Akurat dan sesuai dengan Standar akuntansi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	295,28 %	2,95
2	12	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	30 Orang	12 Lap	22 ASN	22 ASN	100 %	28 ASN	77 ASN	3,08
2	12	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi	9 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan dan Pengujian verifikasi pertanggungjawaban keuangan	12 Dok	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	24 Dok	2
2	12	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Laporan Penjabaran Realisasi Anggaran, Ketepatan waktu dan Kesesuaian Standar Akuntansi atas Penjabaran Realisasi keuangan	12 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	3 Lap	3
2	12	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP yang tersusun dan dilaporkan	1 Dok	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	1 Dok	3 Lap	3
2	12	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD yang Tersusun	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	36 Lap	3
2	12	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Keuangan	Jumlah laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis anggaran yang tersusun	12 Dok	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	36 Lap	3
2	12	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3

2	12	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun	2 Dok	2 Dok	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	03	0002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	12 Lap	13
2	12	01	2	03	0003	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penginputan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Lap	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3
2	12	01	2	05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Jaringan Internet	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	05	0002	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan Lainnya	Jumlah Pembelian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Tersedia	70 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian ASN yang tersusun	12 Dok	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	36 Lap	3
2	12	01	2	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi yang tersedia	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun dan dilaporkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Lap	3
2	12	01	2	05	0006	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	6 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	05	0007	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	05	0008	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan terhadap ASN Pelayanan Dukcapil	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran sebagai pendukung pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3
2	12	01	2	05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen/Instalasi Listrik Penerangan	1 Paket	5 Lap	6 paket	6 paket	100 %	1 Paket	12 Lap	12

							Bangunan Kantor yang disediakan													
2	12	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	5 Lap	-	-	-	1 Paket	14 Lap	14					
2	12	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-					
2	12	01	2	06	0004	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-					
2	12	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Lap	6 paket	6 paket	100 %	12 Paket	15 Jenis	1,25					
2	12	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Dok	5 Lap	6 Dok	6 Dok	100 %	6 Dok	21 Jenis	3,5					
2	12	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-					
2	12	01	2	06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	-	-	-	-	-	-	-					
2	12	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	150 Lap	450	3,10					
2	12	01	2	06	00010	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas yang mendukung kinerja	100 %	100 %	100 %	73,33%	73,33 %	100 %	300 %	3					
2	12	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang diadakan Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang diadakan	2 Unit	-	15 Unit	11 Unit	73,33 %	-	2 Unit	0,67					

2	12	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Roda 4 (empat) yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	07	0003	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	20 Unit	2 Unit	-	-	-	-	4 Unit	0,4	
2	12	01	2	07	0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	11 Unit	2 Unit	-	-	-	11 Unit	11 Unit	0,73	
2	12	01	2	07	0005	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	07	0006	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	07	0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	07	0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3	
2	12	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	28 Lap	2,33	
2	12	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	36 Lap	36 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	51 Lap	1,42	
2	12	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	28 Lap	2,33	
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3	

2	12	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	5 Lap	5 Unit	5 Unit	100 %	14 Unit	46 Unit	3,07
2	12	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	6 Unit	3
2	12	01	2	09	0003	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	09	0004	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 Unit	11 Unit	15 Unit	15 Unit	100 %	15 Unit	41 Unit	2,28
2	12	01	2	09	0005	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	3
2	12	01	2	13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2	13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (Prioritas)	36 %	154,51 %	36 %	54,64%	151,77 %	35 %	144,75 %	3,91
							Persentase Penerbitan KTP-el (Prioritas)	98 %	95,64 %	98 %	94,38 %	96,31 %	98 %	281,03 %	2,84
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk	100 %	-	-	-	-	-	100 %	1
2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan data penduduk non permanen dan rentan	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok (203)	1
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk	3 Dok	-	-	-	-	-	-	-

2	12	02	2	01	0002	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan Inovasi Pelayanan Pendaftaran penduduk	2 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	02	2	01	0003	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Kartu Keluarga	3 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Penerbitan KIA														
							Penerbitan KTP EL														
2	12	02	2	01	0004	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen SKPWNI	1 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap (3150 PD)	1		
2	12	02	2	01	0005	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan Dokumen KIA	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk	Jumlah dokumen Pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	02	2	02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Presentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3			
2	12	02	2	02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran penduduk yang disusun	2 Dok	1 Lap	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	4 Dok	4						
2	12	02	2	02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pembelian Film Printer, Cleaning KIT FARGO, Cleaning KIT EVOLIS, Ribbor KTP dan KIA	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap (1500 Blanko KIA)	1			
2	12	02	2	03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3			
2	12	02	2	03	0001	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	02	2	03	0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Penerbitan Dokumen KIA	3 Dok	1 Lap	1 Dok	1 Dok	100 %	-	2 Dok	0,67						
						Penerbitan Dokumen KK															

						Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen KTP-el							
2	12	02	2	03	0003	Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Terfasilitasi	1 Lap	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	03	0005	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	1 Dok	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	03	0006	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapat Komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	1000 Orang	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	03	0007	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk yang tersedia	4 Dok	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	04		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan capaian pendaftaran penduduk	100 %	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	04	0001	Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk	Junlah dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk	12 Dok	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	04	0002	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1 Lap	-	-	-	-	-	-
2	12	02	2	04	0003	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Lap	-	-	-	-	-	-
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Penunjang)	95 %	94 %	94,5 %	98,27 %	103,99 %	94,5 %	275,46%
														2,81

2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase peningkatan layanan pencatatan sipil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	286,96 %	2,87
2	12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Akta Kelahiran Penerbitan Akta Kematian Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian Non Muslim	3 Dok	-	-	-	-	-	-	0,33
2	12	03	2	01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Layanan	-	-	-	-	-	2 Jenis Layanan	1
2	12	03	2	01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Data, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	03	2	01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Data dan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	2 Dok	1 Lap	3Lap	3 Lap	100 %	3 Dok	4 Dok	2
2	12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase peningkatan penyelenggaraan pencatatan sipil	100 %	-	-	-	-	-	100 %	1
2	12	03	2	02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Kementerian Terkait	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	03	2	02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Kementerian Terkait	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	03	2	02	0003	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam	-	-	-	-	-	-	-	-

							penerbitan pelayanan pencatatan sipil												
2	12	03	2	02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	3 Lap	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap	0,33		
2	12	03	2	02	0005	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Penyediaan jaringan internet dan fasilitas lainnya yang memadai	2 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	02	0006	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	02	0007	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	02	0008	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Edukasi Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	02	0009	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan sipil	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Meningkatnya Wawasan Pelaku Pelayanan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	12	03	2	03	0004	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (Penunjang)	88,46 %	80,01 %	88,46 %	62,96 %	71,17 %	88,46 %	288,14 %	2,88
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %	1
2	12	04	2	01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penyusunan Buku Agregat Kependudukan	2 Lap	2 Lap	-	-	-	-	2 Lap	1
2	12	04	2	01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemberian Hak Akses Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna	17 Dok	16 PKS	-	-	-	-	8 OPD	0,4
2	12	04	2	01	0003	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembnagunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase peningkatan penataan pengelolaan infromasi administrasi kependudukan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	2
2	12	04	2	02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terkait Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	-	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	1 Dok	3 Dok	1,5
2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	100 %	80,77%	100 %	81,48 %	81,48 %	100 %	280,77%	2,81
2	12	04	2	03	0001	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	03	0002	Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Jumlah dokumen Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	-	-	-	-	-	-	-	-

2	12	04	2	03	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penggunaan Aplikasi SIAK Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk	12 Lap	2 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	2 Lap	5 Lap	2,5
2	12	04	2	03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	7 Dok	-	27 PKS	17 PKS	62,96 %	7 Dok	23 Dok	3,29
2	12	04	2	03	0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	03	0006	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase informasi administarsi kependudukan yang diawasi dan dibina	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	04	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Pelaksanaan Supervisi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	04	2	04	0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan (Penunjang)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300%	3

2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data profil kependudukan yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300%	3
2	12	05	2	01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang disediakan	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	-	3 Dok	1,5
2	12	05	2	01	0002	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Data Kependudukan yang disediakan	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	2 Dok	2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik)

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el dari seluruh wajib KTP-el yang ada.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa Perekaman KTP el pada Tahun 2024 adalah sebesar 94,31 % dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98 % dengan capaian sebesar 96,19 %. Hal ini disebabkan karena pelayanan keliling (jemput bola) ke Kecamatan hanya dilakukan di beberapa Kecamatan Kepulauan disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sarana pelayanan. Selain itu masih adanya beberapa data penduduk wajib perekaman KTP-el yang ada pada database SIAK yang setelah dilakukan verifikasi data dilapangan belum melakukan perekaman KTP-el di Dinas terkait.

2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak dibagi dengan jumlah anak usia 0 – 18 tahun kurang 1 Hari.

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan diketahui bahwa persentase penerbitan KIA pada tahun 2024 sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 36 % dengan realisasi sebesar 52,64 % sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 146,22 % . Hal ini disebabkan karena meningkatkan kesadaran orangtua terkait pentingnya KIA untuk kelanjutan pendidikan anak dan pelayanan public lainnya.

3. Persentase Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi dengan jumlah Kepala Keluarga. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 100 %. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan Kartu keluarga juga meningkat.

B. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Persentase Jumlah penduduk umur 0 – 17 Tahun yang memiliki akta kelahiran

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 – 17 Tahun yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0 – 17 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 0 – 17 Tahun.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan Tahun 2024 dapat diketahui bahwa realisasi untuk penerbitan akta kelahiran penduduk umur 0 – 17 Tahun adalah sebesar 93,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indikator ini belum mencapai target yaitu 94,5%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta pencatatan sipil. Selain itu disebabkan pula karena keterbatasan anggaran untuk melakukan kunjungan ke desa-desa atau sekolah untuk dilakukan pelayanan jemput bola.

2. Persentase jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kematian yang dilaporkan di tahun yang sama. Adapun realisasi penerbitan akta kematian berdasarkan laporan yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester II (dua) adalah sebanyak 584 dari laporan yang diterima sebanyak 586 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penerbitan akta kematian tahun 2024 adalah sebesar 99,66 %.

3. Persentase jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah akta perkawinan dan perceraian yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah akta perkawinan dan perceraian pada tahun yang bersangkutan. Realisasi untuk akta perkawinan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 adalah sebanyak 4 akta perkawinan dan untuk akta perceraian sebanyak 2 akta perceraian.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan diketahui bahwa cakupan persentase akta pencatatan sipil sudah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam perubahan renstra maupun perjanjian kinerja dimana realisasi untuk akta pencatatan sipil adalah sebesar 98,23 % dari target sebesar 94,5 % dengan capaian sekitar 103,95 %. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran Masyarakat terkait pentingnya dokumen Akta pencatatan Sipil.

C. Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Persentase ketersediaan data profil kependudukan

Indikator ini menggambarkan persentase ketersediaan data profil kependudukan yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah buku data profil kependudukan yang diterbitkan pada tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah buku data profil kependudukan. Untuk realisasi persentase ketersediaan data profil kependudukan sampai dengan semester dua Tahun 2024 adalah sebesar 100 % dari target 100 % yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Cakupan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian dan Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang pengukurannya berdasarkan pada jumlah Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian dan Lembaga yang telah memiliki akses data dan perjanjian kerjasama dengan Dirjen Dukcapil dibagi dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian dan Lembaga di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari analisis kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sampai dengan

semester 2 Tahun 2024 adalah sebanyak 17 OPD atau sebesar 62,96 % dari target 27 OPD atau sebesar 88,46% dengan capaian sebesar 71,17%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indikator kinerja ini belum mencapai target disebabkan karena :

- a. Masih kurangnya OPD yang bermohon untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan pada Disdukcapil.
- b. Adanya penambahan persyaratan bagi OPD yang akan bekerjasama dalam pemanfaatan data Kependudukan berupa sertifikat ISO 27001
- c. Adanya keterlambatan persetujuan terkait pemanfaatan data dari Kemendagri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan program kegiatannya mengacu pada indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2029.

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada uraikan tabel TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC. 30

Pencapaian Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran/target dari tahun 2022-2026 untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	IKK	Target Renstra Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke..		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Persentase Cakupan Kartu Keluarga	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	-	-	97%	98%	99%	100%	92,77%	94,27%	99%	100%	-
3	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	35%	36%	37%	40%	54,08%	52,64%	37%	40%	-
4	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	-	-	94%	94,5%	95%	95,50%	86,96%	98,23%	95%	95,50%	-
5	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	-	-	76,92%	88,46%	100%	100%	80,01%	62,96%	100%	100%	-
6	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Beberapa factor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perekaman KTP el dan penerbitan akta pencatatan sipil belum mencapai target karena tidak adanya pelayanan keliling ataupun jemput bola disebabkan karena keterbatasan anggaran APBD. Selain itu data cakupan penduduk wajib perekaman KTP-el di 11 kecamatan kabupaten kepulauan selayar masih terdapat beberapa data penduduk wajib perekaman KTP-el yang ada pada database SIAK yang setelah dilakukan verifikasi data belum melakukan perekaman KTPel di Dinas terkait.
2. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama belum mencapai 100% karena :
 - a. Masih kurangnya OPD yang bermohon untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan pada Disdukcapil.
 - b. Adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data yang akan bekerjasama dalam pemanfaatan data Kependudukan berupa sertifikat ISO.
 - c. Adanya keterlambatan persetujuan terkait pemanfaatan data dari Kemendagri
 - d. Adanya maintenance pada jaringan di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun beberapa factor pendukung yang menyebabkan terpenuhinya dan melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sudah melebihi target karena didukung oleh pelaksanaan inovasi “Alamakk” dimana anak yang lahir selain dibuatkan akta kelahiran juga dibuatkan KIA.
3. Adanya pemanfaatan kemajuan teknologi dimana penerima layanan bisa dilayani atau mengurus administrasi kependudukan secara online melalui whatsapp.
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (weaknees). Serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah dan tindaklanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor keberhasilan dengan pendekatan analisis SWOT (Strenngths, weakness, oppourtinity dan Treats) sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Faktor – Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan Ancaman (threats) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
1. Adanya dukungan anggaran dari APBD	1. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan
2. Adanya Regulasi untuk pengurusan Administrasi Kependudukan	2. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh, khususnya wilayah kepulauan
3. Adanya perkembangan teknologi IT	3. Masih tersentralisasinya material blangko dan ribbon KTP-El. di Pusat.

2. Faktor – faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (Strenght) dan Weakness (Kelemahan) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Struktur Organisasi dan Tugas fungsi (kewenangan) yang jelas	1. Belum memadainya perangkat teknologi informasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
2. Tersedianya Undang-undang tentang Adm.Kependudukan	2. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
3. Adanya komitmen Pimpinan dan Staf untuk diterapkannya pelayanan prima	3. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi
4. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan	4. Budaya kerja masih lemah

Dalam hal tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat Daerah Propinsi dengan Kementerian yang ada sangat mendukung visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga hal – hal yang akan menghambat dalam pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan bermasalah jika tidak ada kejadian luar biasa sehingga sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Daerah maupun Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Kementerian dalam negeri akan bersinergi sesuai apa yang telah direncanakan dalam pencapaian kinerja pembangunan.

2.2.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sejauh ini permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Masih kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk alamiah dan mutasi penduduk yang berakibat pada petugas pendata ditingkat desa tidak melaporkan peristiwa tersebut.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti identitas diri.
4. Masih kurangnya Petugas pelayanan, Operator computer dan petugas verifikasi yang berstatus sebagai PNS.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik untuk pelayanan maupun sarana pendukung.
6. Tidak cukup tersedianya anggaran yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Sarana dan Prasarana yang belum semua di update untuk percepatan pelayanan.
3. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Kurangnya SDM baik dibagian sekretariat maupun dibagian pelayanan terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/jemput bola (Jebol)
5. Tidak memadainya anggaran untuk melakukan pelayanan keliling atau jemput bola (Jebol).
6. Terkait kendala system (Gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi SIAK).
7. Penggunaan akses data diwajibkan OPD pemanfaat data melaksanakan ISO atau harus memiliki sertifikat ISO 27001 yaitu terkait system manajemen keamanan data.
8. Beralihnya System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat dan focus keamanan data sejak Maret Tahun 2022 dan dihapusnya data kependudukan local sejak 1 November tahun 2022 di masing-masing Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan beberapa

kendala saat melakukan pengelolaan data atau yang mengakibatkan lambatnya proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun untuk kepentingan penduduk.

Sedangkan peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan :

1. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik.
2. Selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait.
3. Adanya dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukpencaipil kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Adanya beberapa inovasi yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk menurus dan memperoleh dokumen kependudukan.

2.2.3 Dampak terhadap Pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap program Nasional

Dari Pernyataan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029 adalah :

“ Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”

Bersama adalah “*Bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah*”, dengan **Prinsip Pembangunan** :

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan.
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan,
3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan.

4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan.
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya.
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan.
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

***Membawa** artinya “Pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera”.*

***Maju** artinya “Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigm pembangunan dengan menerapkan **digitalisasi dan teknologi industri** pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan **hilirisasi** sumber daya alam berbasis **UMKM** dan **huluisasi** pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal”, dengan agenda pembangunan di bawah ini.*

“Agenda Pembangunan” :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan keimanan dan ketakwaan (Imtak).
2. Pengembangan Perekonomian Daerah.
3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
4. Pengembangan Sosial, Budaya, dan Agama.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif.

***Sejahtera** artinya “Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran dan kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli masyarakat**”, dengan **kondisi** yang diharapkan :*

1. kesempatan berusaha terbuka;
2. lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;

6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disdukpencahil
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar

Visi: “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD Disdukpencahil	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)		
1	Misi – 1 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid dan akurat. 2. Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil yang belum optimal 3. Belum meratanya layanan kependudukan ke kepulauan Akibat factor geografis 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi yang dilaksanakan belum sampai tingkat pedesaan di wilayah kepulauan • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan • Ketersediaan SDM pegawai yang tidak memadai dan tidak merata Terbatasnya biaya transportasi disetiap desa terutama di kecamatan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang terpisahkan dari ibu kota kecamatan • Masih belum tersedianya jaringan internet untuk akses layanan adminduk di beberapa desa terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi • Melaksanakan pelayanan keliling administrasi kependudukan (jemput Bola) • Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang cukup dan memadai • Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM • Penyediaan budget/dan transportasi untuk pemenuhan layanan adminduk • Pemasangan jaringan internet disetiap desa untuk pelayanan adminduk secara menyeluruh

		<p>dan keberadaan jaringan internet</p> <p>4. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data kependudukan oleh Instansi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pemahaman Instansi/Opd terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga, • Lambatnya respon dari Dirjen Dukcapil terkait PKS dan pemberian User sehingga memperlambat proses pemanfaatan data kependudukan
--	--	---	---	--

2.2.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Sehubungan dengan rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat beberapa isu – isu penting yang dikemukakan untuk dijadikan landasan dan perumusan strategis untuk mendukung keberadaan agenda utama visi misi Kepala Daerah, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup bagi pelayanan perangkat daerah dan mendukung visi misi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang valid untuk mendukung hak sipil dan pemanfaatan bonus demografi.
2. Optimalisasi layanan administrasi kependudukan melalui Transformasi digital.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan berintegritas.
4. Perluasan akses dan pemerataan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga wilayah kepulauan.
5. Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis dalam berbagai pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

2.2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan Nasional. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun masih banyak terdapat hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Renstra 2025 – 2029 dan menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari rancangan awal yang telah disusun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan kedalam penetapan kinerja tahun berikutnya.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel. T.C. 31 berikut ini :

Tabel TC. 31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.000.101.000	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.242.338.000
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Kinerja (%) Persentase Capaian Kinerja Keuangan			3.697.101.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Kinerja (%) Persentase Capaian Kinerja Keuangan			4.149.838.000
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	Benteng		90.292.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	Benteng		213.792.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Benteng	3 Dok	40.292.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Benteng	3 Dok	41.292.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.500.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.500.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.500.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	Benteng	1 Dok.	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil	benteng	1 Dok.	5.500.000

		penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD					koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD			
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Benteng	3 Lap	5.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Benteng	3 Lap	5.500.000
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Benteng	3 Lap	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Benteng	3 Lap	30.000.000
8.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Benteng	1 dok		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Benteng	1 dok	20.000.000
9.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Benteng	1 data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Benteng	1 data	10.000.000
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Benteng	1 berita acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Benteng	1 berita acara	30.000.000
11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Benteng	1 dok	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Benteng	1 dok	10.000.000
12.	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Benteng	1 subtansi	-	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Benteng	1 subtansi	15.000.000

13.	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Benteng	1 berita Acara	-	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Benteng	1 berita acara	30.000.000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu			2.612.646.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu			2.622.146.000
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Benteng	26 Orang/bulan	2.557.646.000,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Benteng	26 Orang/bulan	2.557.646.000
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Benteng	1 Dok	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Benteng	1 Dok	5.500.000
3.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Benteng	12 dok	-	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Benteng	12 dok	7.000.000
4.	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Benteng	1 lap	18.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Benteng	1 lap	18.500.000
5.	Pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Benteng	1 dok	5.000.000,	Pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Benteng	1 dok	5.500.000
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Benteng	12 lap	22.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan keuangan	Benteng	12 lap	22.500.000

							bulanan/triwulan/semester SKPD			
7.	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Benteng	12 dok	5.000.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Benteng	12 dok	5.500.000
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu			4.431.000,	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan Barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu			8.400.000
1.	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Benteng	2 dok	0	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Benteng	2 dok	4.000.000
2.	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Benteng	4 lap	4.431.000	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Benteng	4 lap	4.400.000,
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik			5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik			185.500.000
1.	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Benteng	70 paket	0	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Benteng	70 pake	75.000.000
2.	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan kepegawaian	Benteng	12 dok	5.000.000,	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan kepegawaian	Benteng	12 dok	5.500.000
3.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Benteng	1 dok	0	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Benteng	1 dok	4.000.000
4.	Pendidikan dan latihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dalam dan keluar provinsi	6 orang	0	Pendidikan dan latihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Benteng	6 orang	36.000.000

5.	Sosialisasi peraturan perundang – perundangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	Benteng	40 orang	0	Sosialisasi peraturan perundang – perundangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	Benteng	40 orang	45.000.000
6.	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Dalam dan keluar provinsi	10 orang	0	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Dalam dan keluar provinsi	10 orang	20.000.000
e.	Administrasi umum perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor			371.000.000	Administrasi umum perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor			415.700.000
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	benteng	1 paket	4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	benteng	1 paket	4.500.000
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Benteng	1 paket	150.000.000,	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Benteng	1 paket	150.500.000
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 pake	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	5.500.000
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Benteng	1 paket	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Benteng	1 paket	7.000.000
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Benteng	12 paket	7.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Benteng	12 paket	7.700.000
6.	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Benteng	1 lap	0	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Benteng	1 lap	15.000.000
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang tersedia	Benteng	6 dok	5.000.000,	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang tersedia	Benteng	6 dok	5.500.000,

8.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan keluar provinsi	150 lap	200.000.000,	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Benteng	150 lap	220.000.000
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan BMD			185.272.000	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan BMD			228.500.000,
1.	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Benteng	1 Unit	30.000.000,	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Benteng	2 unit	35.000.000
2.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	0	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	33.000.000
3.	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Benteng	10 unit	5.272.000	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Benteng	10 unit	5.500.000
4.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dalam dan keluar provinsi	11 unit	150.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Benteng	11 unit	155.000.000
g.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			287.500.000,	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			308.800.000
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	Benteng	12 lap	8.000.000,	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Benteng	12 lap	8.800.000
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	Benteng	12 lap	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	Benteng	12 lap	100.000.000
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Benteng	12 lap	189.500.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Benteng	12 lap	200.000.000
h.	Pemeliharaan barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik			140.960.000	Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang	Persentase BMD dalam kondisi baik			167.000.000

	penunjang Urusan Pemerintahan daerah					Urusan Pemerintahan daerah				
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Benteng	15 unit	29.460.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Benteng	15 unit	30.000.000
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Benteng	2 unit	68.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Benteng	2 unit	70.000.000
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Benteng	7 unit	9.500.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Benteng	7 unit	12.000.000
4.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak berwujud yang dipelihara	Benteng	1 unit	4.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak berwujud yang dipelihara	Benteng	1 Unit	5.000.000
5.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Benteng	1 unit	30.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Benteng	1 unit	50.000.000
B.	PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan KTP-el 96% Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 30%			160.000.000,	PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan KTP-el 96% Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 30%			491.500.000
a.	Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan layanan pendaftaran penduduk			40.000.000	Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan layanan pendaftaran penduduk			126.500.000
1.	Pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi kependudukan	Benteng	1 dok	0	Pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi kependudukan	Benteng	1 dok	15.500.000

2.	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kepulauan Selayar	2 lap	0	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Benteng	2 lap	21.000.000
3.	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Kepulauan Selayar	3 dok	40.000.000	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Benteng	3 dok	44.000.000,
4.	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Kepulauan Selayar	1 lap	0	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Benteng	1 lap	17.500.000
5.	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan (KIA) yang diterbitkan	Kepulauan Selayar	1 dok	0	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan (KIA) yang diterbitkan	Benteng	1 dok	28.500.000
b.	Penataan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan penataan pendaftaran penduduk			0	Penataan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan penataan pendaftaran penduduk			140.000.000
1.	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk	Jumlah tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	Kab. Kep. Selayar	2 paket	0	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk	Jumlah tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	Kab. Kep. Selayar	2 paket	40.000.000
2.	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dalam dan luar provinsi	1 dok	0	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dalam dan luar provinsi	1 dok	100.000.000

c.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			120.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			225.000.000
1.	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Kab. Kep. Selayar	6 dok	100.000.000	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Kab. Kep. Selayar	6 dok	200.000.000,
2.	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20.000.000,	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kab. Kep. Selayar	1 lap	25.000.000
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase penerbitan Akta Pencatatan Sipil 95 %			60.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase penerbitan Akta Pencatatan Sipil 95 %			401.000.000
a.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan layanan pencatatan sipil			60.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan layanan pencatatan sipil			120.000.000
1.	Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Kep. Selayar	5 dok	40.000.000	Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Kep. Selayar	5 dok	50.000.000
2.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Kab. Kep. Selayar	5 layanan	20.000.000	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Kab. Kep. Selayar	5 layanan	30.000.000
3.	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	Kab. Kep. Selayar	2 dok	0	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	Kab. Kep. Selayar	2 dok	40.000.000
b.	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pencatatan sipil			0	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase peningkatan			281.000.000

							Penyelenggaraan pencatatan sipil			
1.	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kab. Kep. Selayar	3 lap	0	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kab. Kep. Selayar	3 lap	180.000.000
2.	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Benteng	2 lap	0	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Benteng	2 lap	80.500.000
3.	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Benteng	1 dok	0	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Benteng	1 dok	20.500.000
D.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			83.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			200.000.000
a.	Pengumpulan data Kependudukan, pemanfaatan dan penyajian dtabase kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan			25.000.000	Pengumpulan data Kependudukan, pemanfaatan dan penyajian dtabase kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan			105.000.000
1.	Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Benteng	2 Dok	25.000.000	Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Benteng	2 dok	30.000.000
2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dalam dan keluar provinsi	2 dok	0	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dalam dan keluar provinsi	2 dok	75.000.000
b.	Penataan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan penataan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan			0	Penataan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan penataan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan			40.000.000
1.	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan,	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan,	Benteng	2 dok	0	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan,	Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan,	Benteng	2 dok	40.000.000

	pemantauan. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	pemantauan. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan				pemantauan. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	pemantauan. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
c.	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan			47.000.000	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan			55.000.000	
1.	Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Kep. Selayar	1 lap	17.000.000,	Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Kep. Selayar	1 lap	20.000.000	
2.	Penyelenggaran pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaran pemanfatan data kependudukan	Kab. Kep. Selayar	5 dok	30.000.000	Penyelenggaran pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaran pemanfaatan data kependudukan	Kab. Kep. Selayar	5 dok	35.000.000	
E.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Profil Kependudukan			0	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Profil Kependudukan			0	
a.	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Profil kependudukan yang tersusun			0	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Profil kependudukan yang tersusun			0	
1.	Penyediaan Data kependudukan Kab/Kota	Jumlah Data kependudukan Kab/Kota yang disediakan	Benteng	1 dok	11.000.0000	Penyediaan Data kependudukan Kab/Kota	Jumlah Data kependudukan Kab/Kota yang disediakan	Benteng	1 dok	11.000.000	
JUMLAH					4.000.101.000						5.242.338.000

Dari tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa terdapat sepuluh (17) kegiatan pada empat (4) program yang memiliki besaran anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis antara lain. Perbedaan anggaran ini disebabkan karena terbatasnya anggaran program kegiatan yang diberikan, sementara hasil analisis kegiatan tersebut diusulkan untuk di anggarkan karena termasuk kegiatan yang menjadi penunjang/pendukung untuk bisa lancarnya dan terlaksananya kegiatan demi keberhasilan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2026 dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan kelompok masyarakat, melalui musrembang desa/kelurahan dan musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Langkah ini dilakukan dalam penyempurnaan Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari hasil tersebut dapat digabungkan dengan kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasar dari program dan kegiatan yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. yang didasarkan masukan dari :

1. Kecamatan, berupa berita acara kesepakatan hasil musrembang RKPD Kabupaten dikecamatan yang memuat daftar prioritas program/kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. DPRD Kabupaten, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD Kabupaten/Kota (sesuai komisi DPRD sebagai mitra masing-masing Perangkat Daerah)

Rumusan usulan program dan kegiatan yang dimaksud dijabarkan dalam tabel T-C 32 sebagai berikut :

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cat.
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase capaian realisasi anggaran (%)	Kab. Kep. Selayar	95 %	2.818.126.200	APBD	
		Persentase capaian kinerja OPD		70 %			
		Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		89 %			
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peresentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu dan sesuai dengan standar	Kab. Kep. Selayar	100 %	67.565.200		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Renstra	Kab. Kep. Selayar	1 Dok.	17.976.000	APBD	
2 Penyusunan Dokumen Renja Awal		1 Dok.					
3 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan		1 Dok.					
4. Perjanjian Kinerja		1 Dok.					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	Kab. Kep. Selayar	1 Dok.	5.000.000	APBD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	Kab. Kep. Selayar	1 Dok.	5,000,000	APBD	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	Kab. Kep. Selayar	1 Dok.	5,000,000	APBD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peubahan DPA SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	Kab. Kep. Selayar	1 Dok.	5,000,000	APBD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan Laporan LAKIP	Kab. Kep. Selayar	1 Lap.	5,000,000	APBD	
		2 Penyusunan LPPD		1 Lap.			
		3 Penyusunan LKPJ		1 Lap.			
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Evaluasi Perjanjian Kinerja	Kab. Kep. Selayar	1 Lap.	17.589.200	APBD	
		2 Evaluasi Rencana Kerja dan capaian kinerja		1 Lap.			
		3 Penyusunan Laporan SKM		1 Lap.			
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Kab. Kep. Selayar	100%	2.185.647.100	APBD	
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	25 Orang /bulan	2.150.723.500	APBD	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Penyusunan laporan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi pertanggungjawaban keuangan/penggunaan anggaran	Kab. Kep. Selayar	1 Dok.	5,000,000	APBD	

10	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Penyusunan laporan penjabaran realisasi anggaran dan Ketepatan waktu penyusunan serta kesesuaian standar akuntansi atas penjabaran realisasi keuangan	Kab. Kep. Selayar	1 Dok	0	APBD	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kep. Selayar	1 Dok	8.211.600	APBD	
12	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Kep. Selayar	1 Dok	5.000,000	APBD	
13	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan	Kab. Kep. Selayar	12 Lap	11.712.000	APBD	
14	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	Penyusunan laporan realisasi anggaran dan prognosis anggaran	Kab. Kep. Selayar	12 Lap	5.000.000	APBD	
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai penunjang pelayanan		100%	4,000,000		
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	a. Penyusunan RKBMD b. Penyusunan RKPBMMD	Kab. Kep. Selayar	1 lap	0	APBD	
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kep. Selayar	4 lap	4.000,000	APBD	
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penginputan Barang Milik Daerah ke Aplikasi BMD	Kab. Kep. Selayar	1 lap	0	APBD	
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian ASN		100%	5,560,000		
19	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan Jaringan Internet	Kab. Kep. Selayar	0	0	APBD	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Kep. Selayar	64 orang	0	APBD	
21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian ASN	Kab. Kep. Selayar	12 lap	5,560,000	APBD	
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kep. Selayar	12 lap	0	APBD	
23	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Kep. Selayar	1 lap	0	APBD	
24	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti bintek dan pelatihan	Dalam dan Keluar Provinsi	10 orang	0	APBD	
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh 100 orang peserta	Kab. Kep. Selayar	1 lap	0	APBD	
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan terhadap ASN Pelayanan Dukcapil	Dalam dan Keluar Provinsi	1 lap	0	APBD	
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran sebagai pendukung pelayanan	Kab. Kep. Selayar	100%	116.000.000		
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Benteng	6 Jenis	4,000,000	APBD	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian UPS APC 500 W, Mobile-eyes L1 Identity Solutions Iriss Capture, Finger Print L-1 Identity Solutions	Benteng	8 jenis (18Unit)	0	APBD	

		Finger Capture, Topaz Signatur PAD, Voltage Regulator, Tester LAN, Kabel LAN, Konektor RJ-45					
29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	Benteng	8 jenis	7.000.000	APBD	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Benteng	10 jenis	5.000.000	APBD	
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam Daerah dan Keluar Daerah	12 lap	100.000.000	APBD	
32	Penatausahaan Arsip Dinamis	Gedung Arsip dan kelengkapannya	Benteng	1 unit	0	APBD	
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kinerja	Kab Kep. Selayar	100%	6,101,100		
33	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) b. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Kab Kep. Selayar Kab Kep. Selayar	3 unit 1 unit	0 0	APBD	
*34	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Roda 4 (empat)	Dalam Provinsi	0	0	APBD	
35	Pengadaan Mebel	Pembelian Meja dan Lemari	Dalam dan Luar Provinsi	11 unit	6.101.100	APBD	
36	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian Peralatan dan Mesin lainnya	Dalam dan Luar Provinsi	9 unit	0	APBD	
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	289.712.800		
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Jasa surat menyurat	Kab Kep. Selayar	4 Jenis	7.420.800	APBD	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Kep. Selayar	3 jenis	93.000,000		
39	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Kep. Selayar	5 jenis	0	APBD	
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Kab Kep. Selayar	6 jenis	189.292.000	APBD	
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya usia pakai sarana dan prasarana penunjang pelayanan			143.540.000		
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan	Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas roda 2	Kab Kep. Selayar	16 unit	19.640.000	APBD	
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas roda 4 (empat)	Kab Kep. Selayar	2 unit	78,900,000	APBD	
43	Pemeliharaan Mebel	Jenis mebel yang dipelihara	Kab Kep. Selayar	10 buah	0	APBD	
44	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab Kep. Selayar	17 unit	14.000.000	APBD	
45	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset tak berwujud (website) yang dipelihara	Kab Kep. Selayar	1 Paket	4.000.000	APBD	
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab Kep. Selayar	1 unit	27.000.000	APBD	

II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase cakupan kepemilikan KTP-el		94,50 %	160.000.000	APBD	
		1. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak		52,70 %			
		2. Persentase Penerapan Identitas Kependudukan (IKD)		15 %			
		A. Pelayanan pendaftaran Penduduk					
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Data Penduduk Non Permanen dan Rentan	Kab Kep. Selayar	1 Lap.	0	APBD	
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Inovasi Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kab Kep. Selayar	1 Lap.	0	APBD	
3	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Penerbitan Dokumen	Kab Kep. Selayar	12 Dok	30.000.000	APBD	
		a. Kartu Keluarga					
		b. KTP EL					
4	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	c. KIA	Kab Kep. Selayar	12 Dok	0	APBD	
		Penerbitan Dokumen SKPWNI					
B.	Penataan Pendaftaran Penduduk				0		
5.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP eL, Formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk	Blanko KIA	Kab Kep. Selayar	5000	0	APBD	
C.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				130.000.000		
6.	Pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	a. Penerbitan Dokumen KTP-el. b. Penerbitan Dokumen KIA c. Penerbitan Dokumen KK	Kab Kep. Selayar	3 Dok	100.000.000	APBD	
7.	Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Kab Kep. Selayar	1 Lap.	30.000.000	APBD	
8.	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan Sosialisasi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan di 11 Kecamatan	Kab Kep. Selayar	1 Lap.	0	APBD	
D.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				0		
8.	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk pelayanan	Pelaporan penggunaan blangko hasil penerbitan dokumen kependudukan	Kab Kep. Selayar	12 Lap.	0	APBD	
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 - 17 Tahun yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Kab Kep. Selayar	93,25 %	60.000.000		
		Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		99,66 %			
		Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100 %			
		Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100 %			
		A. Pelayanan Pencatatan Sipil					
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	a. Penerbitan Akta kelahiran b. Penerbitan akta perkawinan dan perceraian Non Muslim c. Penerbitan Akta kematian	Kab Kep. Selayar	12 Dok	30.000.000	APBD	

2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab Kep. Selayar	2 Jenis	0	APBD	
3	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Pelaksanaan pengumpulan Data, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan sipil	Kab Kep. Selayar	1 Lap	0		
4	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Penyusunan laporan penyelenggaraan Adminduk terkait pencatatan sipil	Kab Kep. Selayar	1 Lap	0	APBD	
B.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				30.000.000		
5	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kab./Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi	Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian terkait	Dalam dan Luar Provinsi	4 Orang	0	APBD	
6	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kab./Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kota	Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian terkait	Dalam dan Luar Provinsi	5 Orang	0	APBD	
7	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta Kelahiran	Kab Kep. Selayar	5200 kutipan	0	APBD	
8	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Penyediaan jaringan internet dan fasilitas lainnya yang memadai	Kab Kep. Selayar	4 Jenis	30.000.000	APBD	
9	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan sosialisasi terkait pencatatan sipil	Kab Kep. Selayar	81 Desa	0	APBD	
10	Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Terjalannya komunikasi antar pemangku kepentingan dan masyarakat	Kab Kep. Selayar	11 Kec.	0	APBD	
C.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan sipil	Kab Kep. Selayar	7 Orang	0	APBD	
11	Supervisi bersama dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Meningkatnya wawasan pelaku pelayanan sipil	Kab Kep. Selayar	4 Orang	0	APBD	
12	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dalam dan Luar Provinsi	14 orang	0	APBD	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan b. Pengeporasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan c. Pengolahan dan Penyajian Data Agregat Kependudukan	Kab Kep. Selayar	100% 100% 100%	72.000.000	APBD	
A.	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.	Persentase Ketersediaan data kependudukan	Kab Kep. Selayar	100%	22.000.000	APBD	
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.	Penyusunan Buku Agregat Kependudukan.	Kab Kep. Selayar	2 buku	22.000.000	APBD	
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemberiaan Hak Akses Data Kependudukan kepada lembaga pengguna	Kab Kep. Selayar	26 OPD	0	APBD	
B.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Persentase peningkatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab Kep. Selayar	100 %	0	APBD	
3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab Kep. Selayar	3 Dok	0	APBD	

C.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	Kab Kep. Selayar	100 %	50.000.000	APBD	
4	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	1 Penggunaan Aplikasi SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk 2 Penggunaan Aplikasi SIAK dalam pelayanan pencatatan sipil	Kab Kep. Selayar	2 Lap	20.000.000	APBD	
5.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan (PKS)	Kab Kep. Selayar	5 Dok	30.000.000	APBD	
6.	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab Kep. Selayar	1 kali	0	APBD	
7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.	Edukasi Komunikasi dan Informasi	Kab Kep. Selayar	1 Lap	0	APBD	
D.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan sipil	Dalam dan Luar Provinsi	100 %	0	APBD	
7.	Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan.	Meningkatnya Wawasan Pelaku Pelayanan Sipil	Dalam dan Luar Provinsi	3 kali	0	APBD	
8	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data.	Pelaksanaan Bimbingan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	Dalam dan Luar Provinsi	1 kali	0	APBD	
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Kab Kep. Selayar	100%	11,000,000	APBD	
A.	Penyusunan Profil Kependudukan.	Jumlah Data profil kependudukan yang tersusun	Kab Kep. Selayar	100 %	11.000.000	APBD	
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Kab Kep. Selayar	1 Buku	11,000,000	APBD	
TOTAL						3.121.126.200	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah kesatuan Negara republik Indonesia.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 24 Desember 2013 di tetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perlu dicermati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah dicantumkannya pasal 79 A yang menentukan : “ *Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya*”. Berdasarkan pasal diatas maka semua pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gratis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terwujud.

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukan penelahaan pada Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tujuannya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

No	Sasaran Renstra KL Ditjen Dukcapil	Sasaran Renstra Dukcapil Provinsi Sulsel	Sasaran Renstra Dukcapil Kab. Kepulauan Selayar
1.	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan yang valid, akurat dan inklusif
2.	Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik	Meningkatnya Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien “

Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan sehingga tercipta pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif yang bisa berdampak pada kepuasan bagi masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan yang valid, akurat dan inklusif
- b. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten
- c. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Berikut adalah target dari indicator Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 yang mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.2.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
				2026
1	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	85 %
		1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid, Akurat dan Inklusif	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap	82,41 %
		2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan data Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	85,96 %
		3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 %

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur dengan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- b. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
- c. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
- d. Pemahaman Aparatur dan masyarakat tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Adapun program dan kegiatan yang merupakan rancangan awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
I	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan RKA Perubahan SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</p> <p>Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan</p> <p>Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD</p> <p>Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
	<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</p> <p>Pengadaan Mebel</p>

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PHL dan BPJS Ketenagakerjaan)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	Pelayanan pendaftaran Penduduk
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan
	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
	Penataan Pendaftaran Penduduk
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan Kebutuhan
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa Penting
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan Sipil
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	Penyusunan Profil Kependudukan.
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan praktikum Maju Tahun 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kode					Urusan /Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2026				Catatan Penting	Prantikum Maju Rencana Tahun 2027			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.121.126.200				3.103.350.500		
	2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.121.126.200				3.103.350.500		
	2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.121.126.200				3.103.350.500		
I	2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase capaian realisasi anggaran (%)	Benteng	95 %	2.818.126.200	APBD	-	95,50 %	2.891.153.900		
						2 Persentase capaian kinerja OPD		70 %								71,31 %
						3 Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		89 %								89,30 %
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Benteng	100%	67.565.200	APBD	-	100%	71.000.000		
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Benteng	3 Dok.	17.976.000	APBD	-	3 Dok.	23.000.000		
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.000.000	APBD	-	1 Dok.	5.000.000		
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Benteng	1 Dok.	5.000.000	APBD	-	1 Dok.	5.000.000		

						dokumen perubahan RKA-SKPD								
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.000.000	APBD	-	1 Dok.	5.000.000	
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Benteng	1 Dok.	5.000.000	APBD	-	1 Dok.	5.000.000	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan realisasi ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Benteng	3 Lap	5.000.000	APBD	-	3 Lap	6.000.000	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Benteng	3 Lap	17.589.200	APBD	-	3 Lap	25.000.000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Benteng	3 Dok.	7.000.000	APBD	-	3 Dok.	0	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Benteng	100%	2.185.647.100	APBD		100%	2.264.917.052	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Benteng	30 Orang/bulan	2.150.723.500	APBD	-	33 Orang	2,224.917.052	
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Benteng	-	0	-	-	-	0	
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Benteng	12 Dok	5,000,000	-	-	12 Dok	0	

2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Benteng	12 Dok	-	-	-	12 Dok	-
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Benteng	1 Lap	8.211.600	APBD	-	1 Dok	7.000.000
2	12	01	2.02	0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Benteng	1 Dok	5.000.000	APBD	-	1 Dok	5.000.000
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Benteng	12 Lap	11.712.000	APBD	-	12 Lap	30.000.000
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Benteng	12 Dok	5.000.000	APBD	-	12 Dok	5.000.000
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai penunjang pelayanan	Benteng	100%	4.000.000	APBD	-	100%	4.000.000
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Benteng	4 Lap	4.000.000	APBD	-	4 Lap	4,000,000
2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan barang Milik daerah SKPD	Benteng	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Benteng	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan	Benteng	-	-	-	-	-	-

					Barang Milik Daerah Pada SKPD	dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Benteng	4 Lap	4.000.000	APBD	-	4 Lap	4.000.000
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian ASN	Benteng	100%	5.560,000	APBD	-	100%	5,000,000
2	12	01	2.05	0001	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Benteng	1 Dok	-	-	-	-	-
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Benteng	70 Paket	-	-	-	-	-
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Benteng	12 Dok	5.560,000	APBD	-	12 Dok	5.000.000
2	12	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Benteng	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Benteng	1 Dok	-	APBD	-	1 Dok	-
2	12	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Benteng	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
2	12	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Benteng	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang dipindahtugaskan	Benteng	-	-	-	-	-	-

2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan keluar provinsi	6 orang	-	APBD	-	6 orang	-
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dalam Provinsi	40 Orang	-	APBD	-	40 Orang	-
2	12	01	2.05	0011	BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikutin BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dalam dan keluar provinsi	10 Orang	-	-	-	10 Orang	-
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran sebagai pendukung pelayanan	Benteng	100%	116.000.000	APBD	-	100%	116.000.000
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Benteng	1 Paket	4.000.000	APBD	-	1 Paket	4,000,000
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Benteng	1 Paket	-	APBD	-	1 Paket	-
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Benteng	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Benteng	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Benteng	12 paket	7.000.000	APBD	-	12 paket	7.000.000
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Benteng	6 Dok	5.000.000	-	-	6 Dok	5.000.000

	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Benteng	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Benteng	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan keluar provinsi	175 Lap	100.000.000	APBD	-	150 Lap	100.000.000
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Benteng	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Benteng	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kinerja	Benteng	100%	6.101.100	APBD	-	100%	35.000.000
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	Dalam Provinsi	3 Unit	-	APBD	-	2 unit	-
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Dalam Provinsi	-	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Dalam Provinsi	1 Unit	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan darat tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat tak Bermotor yang Disediakan	Dalam Provinsi	-	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Meja, Kursi dan Lemari)	Benteng	1 Unit	6.101.100	-	-	1 Unit	-

2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Laptop, AC 1 PK, Printer HDP 5600 dan Printer Epson L3110, Printer Brother T300	Dalam dan keluar provinsi	15 unit	-	APBD	-	17 unit	35.000.000
2	12	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Benteng	1 Unit	-	-	-	-	-
2	12	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	Benteng	1 Unit	-	-	-	-	-
2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Benteng	-	-	-	-	-	-
2	12	01	2.07	00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Benteng	15 Unit	-	-	-	-	-
2	12	01	2.07	00011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Benteng	10 Unit	-	-	-	-	-
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Benteng	100%	289.712.800	APBD	-	100%	277.236.848
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Benteng	12 Lap	7.420.800	APBD	-	12 Lap	7.000.000
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	Benteng	36 Lap	93.000.000	APBD	-	36 Lap	80.984.848
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Benteng	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PHL dan BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Benteng	12 Lap	189.292.000	APBD	-	12 Lap	189.252.000

	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana	Benteng	100%	143.540.000	APBD	-	100%	115.000.000
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Benteng	4 Unit	19.640.000	APBD	-	3 Unit	15.000.000
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Benteng	2 Unit	78.900.000	APBD	-	2 Unit	70.000.000
	2	12	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Benteng	1 Unit	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Benteng	1 Unit	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Benteng	17 Unit	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Benteng	18 unit	14.000.000	APBD	-	18 unit	10.000.000
	2	12	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Benteng	1 unit	-	-	-	-	-
	2	12	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Benteng	1 unit	4.000.000	-	-	-	-
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Benteng	1 unit	27.000.000	APBD	-	1 unit	20.000.000
II	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1 Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-el	Benteng	94,50 %	160.000.000	APBD	-	95 %	112.817.300
							2		52,70 %			-	53 %	

						Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)								
						Persentase Penerapan 3 Identitas Kependudukan	15 %				17 %			
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan layanan pendaftaran penduduk	Benteng	100%	30.000.000	APBD	-	100%	30.000.000	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Kepulauan Selayar	1 Dok	-	APBD	-	1 Dok	-	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kepulauan Selayar	3 Dok	30.000.000	-	-	-	30.000.000	
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Pelnyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Kepulauan Selayar	2 Lap	-	APBD	-	2 Lap	-	
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kepulauan Selayar	3 Dok (7900 KK, 1700 KIA, 3300 KTP)	-	APBD	-	3 Dok (8100 KK, 1750 KIA, 3650 KTP)	-	
2	12	02	2.01	0006	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan (Penerbitan Dokumen SKPWNI)	Kepulauan Selayar	1 Lap (1700 PD)	-	APBD	-	1 Lap (1750 PD)	-	
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	Kepulauan Selayar	1 Dok	-	APBD	-	1 Dok	-	

2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data terkait pendaftaran dan Perkembangan penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi data terkait pendaftaran penduduk dan Perkembangan Penduduk	Kepulauan Selayar	1 Dok	-	APBD	-	-	-
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Dalam dan keluar provinsi	100%	0	APBD	-	100%	62.000.000
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran penduduk yang disusun	Kep Selayar	2 Dok	-	-	-	-	-
2	12	2	2.02	0002	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP,-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan Yang Tersedia (Blanko KIA)	Dalam dan keluar provinsi	1 Dok	0	APBD	-	1 Dok	62.000.000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kep Selayar	100%	130.000.000	APBD	-	100%	20.817.300
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dalam dan keluar provinsi	5 Lap	-	-	-	-	-
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan	Kep. Selayar	3 Dok (3800 KK, 2000KTP, 2900 KIA)	100.000.000	APBD	-	3 Dok 4000 KK, 2500 KTP, 3500 KIA)	-

2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	1 Lap	30.000.000	APBD	-	1 Lap	20.817.300
2	12	02	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Kep. Selayar	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	-	-	-	-	1 Lap	-
2	12	02	2.03	0006	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	1500 Orang	-	-	-	2000 Orang	-
2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Kep. Selayar	4 Dok	-	-	-	4 Dok	-
2	12	02	2.04		Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaaa dan pengawasan terkait peningkatan capaian penyelenggaraan perdataan penduduk	Kep. Selayar	100%	-	-	-	100%	-
2	12	02	2.04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Menggunakan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Menggunakan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	12 Dok	-	-	-	12 Dok	-

	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kep. Selayar	1 Lap	-	-	-	-	-
III	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 – 17 Tahun yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Kep Selayar	93,25 %	60.000.000	APBD	-	93,50%	36.404.400
							Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		99,66 %				99,70 %	
							Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100 %				100 %	
							Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100 %				100 %	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan layanan Pencatatan Sipil	Kep Selayar	100%	30.000.000	APBD	-	100%	18.000.000
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kep. Selayar	3 Dok (3700 Akte Lahir, 270 Akte Kematian, 25 Akte Perkawinan)	30.000.000	APBD	-	3 Dok (3750 Akte Lahir, 270 Akte Kematian, 25 Akte Perkawinan)	-
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang ditingkatkan	Kep. Selayar	2 Layanan	-	APBD	-	2 Layanan	18.000.000
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Kep. Selayar	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-	

2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pendaftaran penduduk yang disusun	Kep. Selayar	2 Dok	-	-	-	2 Dok	-
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTO-EL dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan penyelenggaraan pencatatan sipil	Kep Selayar	100%	30.000.000	APBD	-	100%	18.404.400
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kab/Kota dan Pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk	Terlaksananya koordinasi dengan kementerian terkait	Dalam dan keluar provinsi	5 Lap	-	-	-	5 Lap	-
2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing – Masing Kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing – Masing Kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dalam dan keluar provinsi	7 Lap	-	-	-	7 Lap	-

2	12	03	2.02	0003	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kep. Selayar	15 Lap	-	-	-	15 Lap	-
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan Sipil	Kep Selayar	3 Dok (2600 Akte Lahir, 300 Akte Kematian, 20 Akte Nikah)	-	APBD	-	3 Dok (2600 Akte Lahir, 350 Akte Kematian, 25 Akte Nikah)	-
2	12	03	2.02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Kep. Selayar	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (jaringan internet dan fasilitas lainnya yang memadai)	Kep. Selayar	2 Lap	30.000.000	APBD	-	2 Lap	18.000.000
2	12	03	2.02	0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kep. Selayar	1 Dok	-	APBD	-	1 Dok	-
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kep. Selayar	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
2	12	03	2.02	0009	Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima	Kep. Selayar	1100 Orang	-	-	-	1500 Orang	-

					dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terkait Pencatatan Sipil							
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kep. Selayar	2 Lap	-	-	-	-	-
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap peningkatan capaian pencatatan sipil	Kep Selayar	100%	-	APBD	-	100%	-
2	12	03	2.03	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kep Selayar	12 Dok	-	-	-	12 Dok	-
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan	Kep Selayar	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Kep Selayar	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kepulauan Selayar	15 Orang	-	-	-	15 Orang	-

IV	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Benteng	100%	72.000.000	APBD	-	100%	55.701.000	
	2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan data kependudukan	Benteng	100%	22.000.000	APBD	-	100%	22.000.000	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Benteng	2 Lap	22.000.000	APBD	-	2 Lap	22.000.000
	2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (OPD yang telah menandatangani perjanjian Kerjasama)	Benteng	20 Dok (OPD)	-	APBD	-	20 Dok (OPD)	-
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Benteng	1 Lap	-	-	-	1 Lap	-
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Persentase peningkatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Benteng	100 %	-	-	-	-	-
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyelenggaraan adminduk	Benteng	2 Dok	-	-	-	-	-
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	Benteng	100%	50.000.000	APBD	-	100%	33.701.000

	2	12	04	2,03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kepulauan Selayar	1 Lap	-	-	-	-	-
	2	12	04	2,03	0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Kepulauan Selayar	1 Dok	-	-	-	-	-
	2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Benteng	12 lap	20.000.000	APBD	-	12 Lap	13.000.000
	2	12	04	2,03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kep Selayar	5 Dok	30.000.000	APBD	-	7 Dok	20.701.000
	2	12	04	2,03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Benteng	10 Lap	-	-	-	-	-
	2	12	04	2,03	0006	Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kep Selayar	2 Dok	-	-	-	-	-
	2	12	04	2,03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kep Selayar	1 Lap	-	-	-	-	-
	2	12	04	2,03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kep Selayar	2 Dok	-	-	-	-	-

	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan capaian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kep Selayar	1 Lap	-	-	-	-	-
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kep Selayar	1 Lap	-	-	-	-	-
	2	12	04	2.04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Kep Selayar	1 Dok	-	-	-	-	-
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data.	Jumlah Laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data.	Kep Selayar	1 Lap	-	-	-	-	-
V	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data Profil kependudukan	Kep Selayar	100%	11.000.000	APBD	-	100%	11.273.900
	2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan.	Jumlah data profil kependudukan yang tersusun	Kep Selayar	100%	11.000.000	APBD	-	100%	11.273.900

	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Benteng	2 Dok	-	APBD	-	2 Dok	-
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Dokumen Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Benteng	1 Dok	11.000.000	APBD	-	1 Dok	11.273.900
						JUMLAH					3.121.126.200			3.107.350.500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah disusun merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas atau pedoman yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Renja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan saksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024 dan bersifat fleksibel terhadap hal-hal yang berkembang. Namun yang belum terakomodir akan dijadikan bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya perumusan Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029 dimana seluruh program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator pada renstra untuk Tahun telah termuat dalam Renja Tahun 2026.
3. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.
4. Perlu adanya penambahan pagu anggaran terutama untuk pengadaan Sarana dan Prasarana pelayanan serta sarana pendukung, tambahan anggaran untuk pelayanan Keliling dan Jemput Bola (Jebol) serta Bimbingan Teknis bagi petugas pelayanan demi untuk lebih maksimalnya pelaksanaan semua kegiatan yang telah tertuang didalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya.

Akhirnya Renja ini dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Benteng, Agustus 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670905 1 98811 1 003